

**IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH
DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR 2012-2013)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

HERMAN SENONG
NIM. 10500109036

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN SAMATA GOWA
MAKASSAR
2013**

ABSTRAK

Nama : HERMAN SENONG
Nim : 105 001 090 36
Fak/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ISTRI
SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2012-2013).

Judul dari skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2012-2013)”. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah Bagaimana implementasi hak istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan bagaimana konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya hak isteri pasca perceraian di PA Makassar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, kajian pustaka. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengetahui proses persidangan dalam studi kasus tentang hak istri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS

Dari hasil pengamatan dan penelitian di PA Makassar kelas 1A, menunjukkan bahwa ketentuan proses persidangan. ialah hak untuk mendapatkan 1/3 atas gaji mantan suaminya dan 1/3 untuk anaknya, untuk melindungi dan menjaga hak-hak tersebut didalam proses beraacara perkara cerai maka hakim menggunakan hak *Hak ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.

Selanjutnya hal yang menjadi konsekuensi hukum tidak terpenuhinya hak istri pasca perceraian adalah memberikan informasi kepada pihak istri bahwa apabila suami tidak melaksanakan isi keputusan secara suka rela maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya sebab majelis hakim dipengadilan agama makassar yang memeriksa permohonan cerai tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi nafkah tersebut

Akhirnya implementasi hak istri tetang isi perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil iyalah pihak suami dan pihak istri pasca perceraian diwajibkan menagangguang beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Adapun beban tersebut adalah kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, kesangsungan pendidkan anak-anaknya menjadi tanggung jawab suami.

KATA PENGANTAR

Puji yang mulia syukur berlimpah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2013-2013)”***.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini mengedepankan ketentuan tentang proses persidangan kedudukan hukum tentang hak isteri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil Selain itu dalam skripsi ini juga membahas tentang konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan skripsi hukum ini dapat terselesaikan, kepada :

Terkhusus kupersembahkan sujud dan taskimku kepada ayahanda dan ibunda ke dua orang tuaku Ayhanda H. Senong dan Ibunda Hj. Hasmawati yang selalu menjadi motifator disetiap langkahku selalu menjadi inspirasi disetiap

keputusanku, yang namaku tak lepas disetiap doanya, ucapan terimakasihku yang berlimpah tak dapat membalas setitik keiklasan yang engkau berikan. Kupersembahkan ini untuk engkau penyemangat hidupku, salam sayangku kepada Adinda Lukman Senong, Riska Nur Auliya yang setiap senyum dan candaanya menjadi penyemangat setiap tugas-tugasku selama menyusun skripsi ini.

Kepada seluruh keluarga yang selama ini telah memberikan semangat dan bantuan dalam banyak hal.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, yang memberikan pencerahan, menjadi contoh pemimpin yang baik;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Para Wakil Dekan yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Hamsir, SH., M.Hum dan Ibu Istiqamah, SH.,MH, masing-masing selaku ketua dan sekretaris jurusan beserta stafnya yang telah banyak memberikan saran yang konstruktif kepada penulis;
4. Bapak Drs. M.Thahir Maloko,MHI. dan Ibu Istiqamah,SH,MH, masing-masing selaku pembimbing penulis yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh staf akademik yang selalu membantu penulis dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan administrasi selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Drs. H. M. Nahiruddin Malle, SH MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan proses penelitian dan seluruh staf dan direksi Pengadilan Agama Makassar yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu penulis selama melakukan penelitian baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Ramlah. S.Kep Ns dan sahabat ku Muh Muhatir SH, Sufirman SM, Baso syarif, adriawan, Andi indra Hadi, Haslam, Kusmianto, Topan S, Ahmad Ichsan Amar yang selalu memberi semangat dan dukungan selama dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini semoga kita selalu menjadi satu yang tak terlupakan.
8. Kepada teman seperjuangan penulis seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum angkatan tahun 2009 yang selalu memberikan motivasi dan mendampingi penulis dalam segala urusan sehingga apa yang dilakukan dalam hal penyelesaian skripsi ini sesuai dengan harapan, semoga gelar sarjana tidak memisahkan kita.

9. Dan yang terakhir kepada diri penulis sendiri yang cukup tegar dan kuat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 30 Juni 2013

Penulis,

HERMAN SENONG
NIM 10 500 1090 36

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Izin Perkawinan	11
B. Pengertian Perkawinan	13
C. Perceraian	15
D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	19
E. Pengertian Hak isteri.....	30
F. Dasar hukum Perceraian.....	34
a. Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.....	34
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	35
 BAB III. METODE PENELITIAN	 42
A. Jenis penelitian	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisa Data.....	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar.....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar.....	45
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar.....	48
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar	52
4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Makassar	52
B. Proses Hukum Yang Dapat Dilakukan Mantan Isteri Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Perceraian.....	58
C. Konsekuensi Hukum Karena tidak Terpenuhinya Hak isteri Pasca Bercerai.....	61
D. Implementasi Hak Isteri Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS.....	63
1. Kewajiban Nafkah Mut'ah Dan Nafka Iddah Sebagai Hak Isteri Setelah Bercerai.....	64
2. Hak terhadap Anak Pasca Perceraian	68
BAB V. P E N U T U P.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus. Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan.

Dengan adanya ketentuan tersebut kata “kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani hidup rumah tangga seorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menimbulkan ketidak harmonisan didalam rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan sering kali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah

tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap tidak sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami isteri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami isteri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka. Mengenai peroses perceraian untuk pasangn suami isteri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan yang bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat, Ketidak harmonisan kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan sangat mengganggu tugas-tugas kedinasannya, oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga terikat oleh Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, yang tentunya tidak mudah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perceraian.

Mengenai perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983. Proses perceraian bagi PNS harus berdasarkan pada PP No. 10 Tahun 1983 tersebut. Salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah dengan meminta izin dari atasan tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan tersebut harus berupa izin tertulis. Mengenai izin ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 yang menyebutkan “pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib

memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. Dengan adanya persyaratan tersebut tampak bahwa perceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya izin dari atasan PNS tersebut tidak dapat melakukan perceraian. Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu jika pasangan suami isteri tersebut sudah tidak dapat hidup dalam suatu perkawinan tetapi belum mendapat surat izin dari atasan dan pihak Pengadilan Agama tidak bisa melakukan perceraian.

Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan hanya PNS sebagai panutan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan atasan yang bersangkutan sehingga proses perceraian PNS tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang atasan PNS apabila akan memberikan izin bercerai bagi bawahannya.

Melihat begitu berpengaruhnya PNS menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka tentunya seorang PNS harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

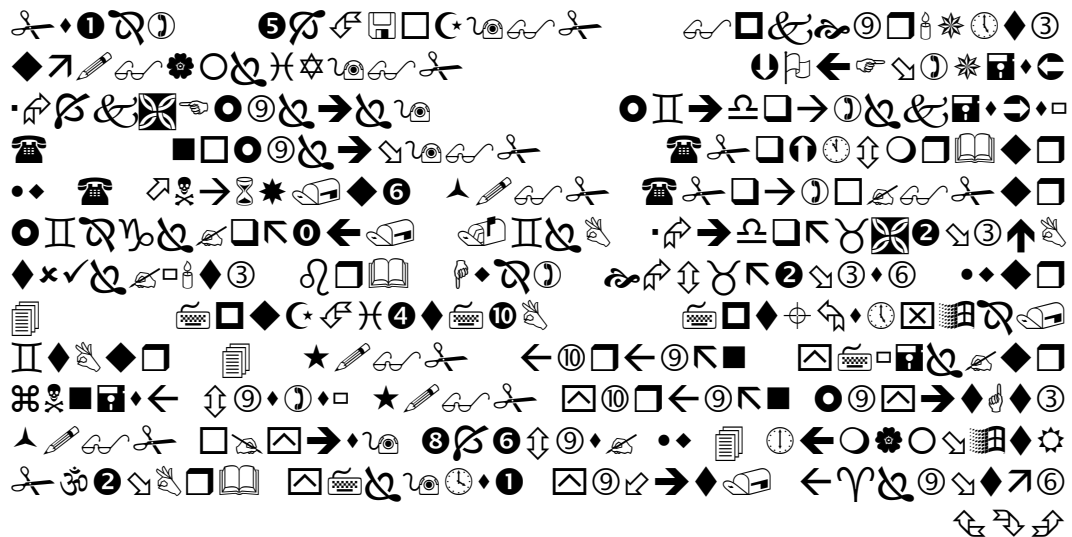
Adapun ayat tentang cerai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 227 yaitu sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

Ayat lain tentang cerai adalah Q.S At-Thalaaq ayat 1 yaitu sebagai berikut:



Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lintas Media, 2006), h. 45.

² *Ibid*, h. 816.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum dengan judul : ***“IMPLEMENTASI HUKUM TENTANG HAK ISTRI SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2012-2013)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum yang dapat dilakukan oleh mantan isteri untuk mendapatkan haknya pasca perceraian di PA Makassar?
2. Bagaimana konsekuensi hukum karna tidak terpenuhinya hak istri pasca perceraian di PA Makassar?
3. Bagaimana implementasi hak istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS ?

C. Defenisi Operasional

Dalam membahas definisi oprasional, maka terdapat beberapa variabel yaitu:

“*Implementasi*” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pelaksanaan.³

“*Hak Istri*” adalah Hak istri sesuatu hal yang didapatkan dari suaminya. Apabila hak tersebut tidak didapatkan dari suaminya maka seorang istri tersebut bisa menuntutnya sebagaimana isi dalam sighthot ta’lik talak.⁴

“*Cerai*” adalah Putusnya ikatan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁵

“*Suami*” Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.⁶

“*Pegawai negeri sipil*” “Pegawai Negeri Sipil” Menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974;
- b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - 1) Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - 2) Pegawai Bank Milik Negara;
 - 3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;

³Departemen Pendidikan Nasaional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), h. 35

⁴ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Publisher,2009), h. 36.

⁵*Ibid.*, h. 90

⁶ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 42.

- 4) Pegawai Bank Milik Daerah;
- 5) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- 6) Atasan langsung Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.⁷

“PP No.45 tahun 1990” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan hukum tentang hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS didasarkan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses hukum yang dapat dilakukan oleh mantan isteri untuk mendapatkan haknya pasca perceraian di PA Makassar
2. Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum karena tidak terpenuhinya Hak Istri pasca bercerai di PA Makassar
3. Untuk mengetahui implementasi hak istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Bandung:Citra Umbara,2007), h. 147.

E. Kegunaan Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui hak–hak mantan istri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
- 2) Masyarakat dapat mengetahui proses hukum yang dapat dilakukan oleh istri untuk mendapatkan haknya.
- 3) Masyarakat dapat mengetahui konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya hak istri tersebut.

b. Bagi Pengadilan Agama

Memberikan suatu bahan pertimbangan bagi hakim, dalam hal pelaksanaan perceraian bagi PNS.

c. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Makassar.
- 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan hukum khususnya mengenai Kedudukan

Hukum Hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

d. Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi terkait

- 1) Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Perguruan Tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai permasalahan perkawinan dan perceraian, sehingga supremasi hukum bisa ditegakkan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kedudukan hukum mengenai hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS didasarkan atas Pemerintah Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan skripsi ini, penulisan hukum ini dibagi kedalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab pertama berisikan pendahuluan yang merupakan landasan dan pemberi arah pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah pokok yang akan dibahas serta mengemukakan tujuan serta manfaat penelitian, juga mengemukakan sistematika penulisan dan definisi operasional.

BAB II: Tinjauan Pustaka Bab kedua ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori. Dalam bab ini diungkap definisi - definisi yang berkaitan dengan persoalan hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS seperti yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni; Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Pembahasan dalam bab dua serta beberapa sub babnya sangat penting sekali untuk dibahas dikaitkan dengan persoalan yang dibahas yakni mengenai istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS.

BAB III : Metode penelitian dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab keempat ini akan mencakup pembahasan pertama tentang proses hukum yang dapat dilakukan oleh mantan isteri untuk mendapatkan haknya pasca perceraian di PA Makassar dan kedua Konsekuensi Hukum karena tidak terpenuhinya Hak Istri pasca bercerai PA Makassar dan ketiga implementasi hak istri bilamana istri diceraikan oleh suami yang berstatus PNS yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

BAB V : Penutup Bab lima ini akan merupakan bab terakhir yang mencakup tentan uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat saran – saran mengenai permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Izin Perkawinan

Izin perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap Warga Negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.¹

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh Pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah di undangkan

¹Simanjuntak, P.N.H *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, rev, cet.4.(Jakarta: Djambatan, 2009), h. 78

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, bahwa :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil Perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil, hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983, kemudian ditegaskan kembali dalam ayat (3) yang menyebutkan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang akan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat yang berwenang.²

B. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang–Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal – pasal yang terdapat di dalam KUHP, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil* (Bandung:Citra Umbara,2007), h. 126-127.

Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

- a. Menurut *Prof. Subekti, S.H.* : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³
- b. Menurut *Prof. Ali Afandi, S.H.* : Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.⁴
- c. Menurut *Prof. Mr. Paul Scholten* : Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁵
- d. Menurut *Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. H.* : Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁶
- e. Menurut *Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.* : Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁷
- f. Menurut *K. Wantjik Saleh, S.H.* : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri.⁸

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1987), h. 23

⁴Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 94

⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 31

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), h. 7

⁷ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 36

Perkawinan menurut Hukum Islam juga dapat diartikan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim dan apabila diperinci merupakan akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnyanya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual.

C. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 208 KUHPer, perceraian atas persetujuan suami-isteri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok hukum Perdata* perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹

Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 14

⁹ Subekti, *op.cit* h. 42.

perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusanya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan Pengadilan.

a. Macam-macam putusnya Perkawinan

Ada tiga macam putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena :

1) Kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

2) Perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- a) Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
 - b) Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.
- 3) Keputusan Pengadilan.

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan.

Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar Ta'lik Talak.
- 8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:

- 1) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
- 2) Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
- 3) Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sdi Mahasatya, 2005), h. 116-117

kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

- 4) Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.¹¹

D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sdi Mahasatya, 2005), h. 118.

melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. Pegawai bulanan di samping pension.
- b. Pegawai Bank Milik Negara.
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
- d. Pegawai Bank Milik Daerah.
- e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹² Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri terdiri atas :
 - a) Pegawai Negeri Sipil,

¹² PDF. UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, h. 2

- b) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³
- 2) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, terdiri atas :
- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.¹⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.

¹³ *Ibid*, h. 3.

¹⁴ *Ibid*, h. 80.

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya proses perceraian masyarakat biasa sama saja dengan masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut¹⁵:

Prosedur dan Proses Penyelesaian Cerai Takak

Prosedur :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau Kuasanya :

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. Jo. Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. Bg Jo. Pasal 58 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- c. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

¹⁵PA Makassar, "Prosedur Penyelesaian Perkara," *Official Website Pengadilan Agama Makassar*, <http://www.pa-makassar.net>, Prosedur (6 juli 2013).

2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/mahkamah syar'iah :

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

3. Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

Proses Penyelesaian Perkara :

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah .
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan Persidangan
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);

- 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R. Bd.).
- b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
- 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar Talak;
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang

penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

4. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).¹⁶

Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

Prosedur :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Istri) atau Kuasanya :

1. a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg Jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

¹⁶PA Makassar, "Prosedur Penyelesaian Perkara," *Official Website Pengadilan Agama Makassar*, <http://www.pa-makassar.net>, Prosedur (6 juli 2013).

- c. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
 - b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
 - c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
 - d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006).

3. Gugatan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R. Bg.)

Prosedur Penyelesaian Perkara:

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan;
3. a. Tahapan Persidangan

- 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R. Bg.).
- b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut:
- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut. Gugatan ditolak.
 - 2) Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
3. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan akta cerai

sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.¹⁷

E. Pengertian Hak Istri

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁸ Menurut van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.¹⁹ Dalam pengertian ini, C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam hak mutlak (hak absolut) dan hak relative (hak nisbi).²⁰

1. Hak Mutlak (hak absolut)

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut.²¹

2. Hak Relatif (hak nisbi)

¹⁷PA Makassar, "Prosedur Penyelesaian Perkara," *Official Website Pengadilan Agama Makassar*, <http://www.pa-makassar.net>, Prosedur (6 juli 2013).

¹⁸ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 119-120 .

¹⁹ *Ibid*, h. 120

²⁰ *Ibid*, h. 120

²¹ *Ibid*, h. 120

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²²

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Adapun yang menjadi Hak-hak Istri atas suami yaitu di antaranya :

- a. Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.
 - b. Menerima maskawin dari suami ketika menikah.
 - c. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga / kdrt.
 - d. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.
 - e. Mendapatkan pergaulan yang baik dan adil dari suami.
3. Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Hak dan kewajiban dari suami-isteri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yaitu :

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

²² *Ibid*, h. 121

- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- e. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama.
- f. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- i. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 79 KHI).

Menurut Pasal 80-82 KHI, kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut :

- a. Suami wajib membimbing isteri dan rumah tangganya,
- b. Suami wajib melindungi istri isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini gugur apabila isteri *nusyurz*.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- f. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman

dan tentram, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta.

- g. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya.

F. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).

Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud

menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan pemeriksaan untuk keperluan itu.

Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak dapat lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²³

a. Perceraian karena Talak

Di dalam Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya. Talak dalam Islam ditentukan oleh bagaimana caranya talak tersebut diucapkan, talak dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Talak Raji'i

Talak raji'i adalah talak yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya selama dalam masa iddah, tanpa tergantung persetujuan istrinya dan tanpa akad yang baru. Yaitu talak pertama dan kedua yang sang suami mempunyai hak untuk rujuk pada masa iddah kapan saja dia mau walaupun istri tidak rela

²³ Simanjuntak, P.N.H., *Op. Cit.*, h. 80-81.

dirujuk. Di dalam talak raji'i ini merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Pada talak raji'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) Talak Bain

Talak bain adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.²⁴

Pada talak ini pihak suami tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak. Pada talak bain ini dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu :

a) Talak Bain Sughra

Talak bain shugra (perpisahan yang kecil) adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya.²⁵ Jika ingin kembali dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Yaitu terjadi ketika masa iddah istri dalam talak raji'i (talak satu dan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 69-75.

²⁵ *Ibid*, h. 69-75

dua) telah selesai, dan sang suami belum merujuknya. Atau contoh yang lain yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli (berhubungan suami istri) maka hukum perceraianya adalah bain sughra. Tidak halal bagi suami untuk merujuknya, jika ingin kembali kepada istrinya itu (mantan istri) atas persetujuan istri dan dengan akad nikah yang baru. Karena hak rujuk ada pada masa iddah sedangkan kondisi seperti ini tidak ada masa iddahnya.

b) Talak Bain Kubra

Talak bain kubra (perpisahan yang besar) adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak ada kesempatan/peluang untuk rujuk (kembali) kepada istrinya. Jika ingin kembali atas persetujuan istri dan dengan akad nikah yang baru. dan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri (jima'), lalu mantan istrinya itu diceraikan atau suaminya meninggal dan masa iddahnya telah selesai.²⁶

Contoh talak tiga, seorang suami menalak istrinya, kemudian merujuknya dalam masa iddah atau menikahinya setelah habis masa iddah. Lalu menalak lagi, kemudian merujuknya dalam masa iddah atau

²⁶ *Ibid*, h. 69-75

menikahnya setelah habis masa iddahanya, lalu dia menalakinya lagi yang ketiga kalinya. Inilah talak ba'inah Qubra yang menjadikan istrinya tidak bisa dirujuk lagi.

Pada talak ini pihak bekas suami dapat rujuk kembali dengan bekas istri apabila bekas istrinya telah melangsungkan perkawinan dengan pria lain dan juga telah bercerai dengan pria tersebut dengan kata lain rujuk dapat dilakukan dilakukan apabila mantan istri melakukan pembubaran perkawinan dengan pria lain.

Pembagian talak ini memang dibuat sedemikian rumitnya dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan. Talak tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil.

Suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, Pengadilan akan memeriksa dan akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan para pihak maka Pengadilan akan menggelar sidang secara tertutup untuk menentukan putusan atas perkara tersebut dan terhadap keputusan yang dijatuhkan, para pihak dapat dimintakan upaya banding dan kasasi.

b. Gugat Cerai

Perceraian karena adanya gugatan cerai ini merupakan hak istri untuk mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami. Dalam hukum Islam gugatan cerai dari pihak istri sering juga disebut dengan istilah khuluk atau talak fasakh. Alasan-alasan yang sering atau dapat diadukan pihak istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami biasanya karena perzinaan, lemah sahawat, perilaku buruk atau tidak bermoral, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak mau melunasi mahar dan yang paling banyak karena pihak suami telah meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama tanpa berita.²⁷

Adapun alasan untuk mengajukan gugat cerai terdapat pula dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

²⁷ *Ibid.* h. 81

- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:(a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi hukum Islam:²⁸

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

²⁸ Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005), h. 50

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
 - d. Suatu biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dan jalan menganalisisnya. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kotamadya Makassar, dalam hal ini di Pengadilan Agama Makassar. Pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 12 Juli 2013.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Makassar.

2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan non random, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, selain itu, besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara arbitrer oleh penulis.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti, yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data

- a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas

dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Pejabat Pengadilan Agama Makassar yang berkompeten dalam memperoleh data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan kemudian dianalisa dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dalam mengukur, menguji, dan menganalisa data tidak menggunakan angka tetapi menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Digunakan metode kualitatif karena penulis hanya meneliti dengan mengungkapkan tentang hak istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus PNS dengan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990. Penulis dalam melakukan analisa berdasarkan kasus yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama kelas I A terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15 Kima Square Blok B12, Makassar Sulawesi Selatan No.Pos 90511.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah **Maknun Dg. Manranoka**, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah **K.H. Abd. Haq** dan **Ince Moh. Sholeh**, dan **Ince Moh. Sholeh** adalah Qadhi terakhir, jabatan **Ince Moh. Sholeh** disebut **Acting Qadhi**. Qadhi dahulu

berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar **Daengta Syeh** kemudian gelar itu berganti menjadi **Daengta Kalia**.

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan.

Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

Ketua Pertama	: K.H. Chalid Husain Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962
Ketua Kedua	: K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964
Ketua Ketiga	: K.H. Haruna Rasyid Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976
Ketua Keempat	: K.H. Chalid Husain Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986
Ketua Kelima	: Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996
Ketua Keenam	: Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998
Ketua Ketujuh	: Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004
Ketua Kedelapan	: Drs. H. M. Tahir R, S.H.

Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005

Ketua Kesembilan : Drs. Anwar Rahmad, M.H.

Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008

Ketua Kesepuluh : Drs. Khaeril R, M.H.

Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010

Ketua Kesebelas : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.

Periode Tahun 2010 s/d (Sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
- 2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

b. Misi

Pertama

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang

mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman"

Kedua

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk :

- 1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- 3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan"

Ketiga

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”.

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum"

Keempat

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain"¹

¹ PA Makassar, “Prosedur Penyelesaian Perkara,” *Official Website Pengadilan Agama Makassar*, <http://www.pa-makassar.net>, Prosedur (6 juli 2013).

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar



4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Makassar.

a. Daftar Hakim

- 1) Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., 19541231 197903 1 056, Bone/ 31 Desember 1954, Hakim Madya Utama.
- 2) Dra.Hj. A. Syamsiah HAM, 19471104 197803 2 001, Sengkang/ 04 Nopember 1947, Hakim Madya Muda.
- 3) H. Mahmuddin S., S.Ag., S.H., 150170539, Selayar/ 19 Januari 1948, Hakim Madya Utama.
- 4) Dra. Hj. Saniati Harun, M.H., 19541231 197903 2 006, Bontonompo/ 31 Desember 1954, Hakim Madya Utama.
- 5) Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H., 19541020 198203 2 003, Watampone/ 20 Oktober 1954, Hakim Madya Utama.

- 6) Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H., 19551231 198203 1 056, Bantaeng/ 31 Desember 1955, Hakim Madya Utama.
- 7) Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H. 19541231 198303 1 050, Bone/ 31 Desember 1954, Hakim Madya Utama.
- 8) Dra.Hj. Hadidjah, M.H. 19560829 198403 2 001 Barru/ 29 Agustus 1956, Hakim Madya Utama.
- 9) Drs. Muh. Arief Musi, S.H. 19590909 198603 1 006, Bone/ 9 September 1959, Hakim Madya Utama.
- 10) Dra. Hj. Nurjaya, MH. 19581231 198703 2 012, Wajo/ Tahun 1958, Hakim Madya Utama.
- 11) Drs. H. Syaharuddin, S.H., M.H. 19561108 198203 1 003, Soppeng/ 8 November 1956, Hakim Madya Muda.
- 12) Drs. Kamaruddin 19601231 198703 1 010, Maros/ 31 Desember 1960, Hakim Madya Muda.
- 13) Drs. H. Muh. Ridwan Latief, S.H., M.H., 19580919 198703 1 002, Soppeng/ 19 September 1958, Hakim Madya Utama.
- 14) Dra.Hj. St. Aminah, M.H. 19591122 198803 2 001, U. Pandang/ 22 Nopember 1959, Hakim Madya Muda.
- 15) Drs. H. Pandi, SH., M.H., 19601231 199003 1 033, Kanang/ 29 september 1960, Hakim Madya Muda.
- 16) Dra.Hj. St. Aminah Malik, M.H., 19630505 199003 2 005, Pompanua/ 05 Mei 1963, Hakim Madya Muda.

17) Dra. Bannasari, 19601231 199103 2 009, U. Pandang/ 14 Juni 1960,
Hakim Madya Muda.

18) Drs. Mahmuddin, M.H., 19641228 199203 1 004, Pagatan/ 28
Desember 1964, Hakim Madya Pratama.

b. Panitera Pengganti

1) Hartinah, SH., 19641010 199303 2 002, Selayar/ 10 Oktober 1964,
Panmud Hukum.

2) Abd. Razak Said, SH., 19551231 198203 1 077, Majene/ 31
Desember 1955, Panmud Permohonan.

3) H. Andi Syamsul Bahri, SH., 19661231 199402 1 005, Bulukumba/
31 Desember 1966, Panmud Gugatan.

4) Dra.Hj. Patmawati, MH., 19611231 198703 2 017, Babang/ 31
Desember 1961, Panitera Pengganti.

5) Dra.Hj. Hajar Makkawaru, 19540422 198203 2 001, Makale/ 22
April 1954, Panitera Pengganti.

6) Hj. St. Bunga, S.Ag, 19531231 198303 2 011, Waringtasi/
Panitera Pengganti.

7) Dra.Hj. Rifqah Sulaiman, 19621231 198703 2 025, Sengkang/ 31
Desember 1962, Panitera Pengganti.

8) Dra.Hj. St. Hafiah S., 19601128 198703 2 001, Pare-pare/ 28
Nopember 1960, Panitera Pengganti.

9) Dra. Hanisang, 19630817 199003 2 004, Bone/ 17 Oktober 1963,
Panitera Pengganti.

- 10) Drs. Abd. Rasyid P., 19591231 199103 1 027, Sidrap/ 31 Desember 1959, Panitera Pengganti.
- 11) Dra. Hj. Jawariah, 19641231 199402 2 002, Malimpong/ 31 Desember 1964, Panitera Pengganti.
- 12) Dra. Sukmawati, 19641016 199303 2 002, Barru/ 16 Oktober 1964, Panitera Pengganti.
- 13) Hj. St. Hajar, SH., 19621231 199403 2 012, Barru/ 31 Desember 1962, Panitera Pengganti.
- 14) Aminah Amir Daus, SH., 19620610 199303 2 002, U. Pandang/ 15 Februari 1962, Panitera Pengganti.
- 15) H.M. Sunusi, SH., 19561231 198203 1 07, Soppeng/ 31 Desember 1956, Panitera Pengganti.
- 16) Hj. St. Munirah, SH, 19581231 198203 2 003, U. Pandang/ 30 Nopember 1958, Panitera Pengganti.
- 17) Hj. Petraniani, SH., 19581222 198303 2 002, U. Pandang/ 22 Desember 1958, Panitera Pengganti.
- 18) Drs. Amiruddin, 19571231 199303 1 017, Sidrap/ 31 Desember 1957, Panitera Pengganti.
- 19) Drs. Haeruddin, 19620714 199303 1 003, Pesse/ 14 Juli 1962, Panitera Pengganti.
- 20) Dra. Nurhayati, 19551204 199303 2 001, Makassar/ 04 April 1955, Panitera Pengganti.
- 21) Hj. Salwa, SH., 19630620 199703 2 001, Pinrang/ 20 Juni 1963,

Panitera Pengganti.

22) Salmah N, BA, 19571231 198703 2 004, Matajang/ 31 Desember 1957, Panitera Pengganti.

23) Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, 19710530 199203 1 001, U. Pandang/ 15 Mei 1971, Panitera Pengganti

24) Thahirah, 19581231 198103 2 018, Watampone/ 18 Oktober 1958, Panitera Pengganti.

25) H. Andi Muhammad Yahya Chalid, 19591031 198103 1 005, U. Pandang/ 31 Oktober 1959, Panitera Pengganti.

26) Fatimah AD, S.H., M.H., 19690823 200003 2 007 U. Pandang/ 23 Agustus 1969, Panitera Pengganti.

c. Kejurusitaan

1) Muhammad Arfah, SH, 19691217 200012 1 001 U., Pandang/ 17 Desember 1969, Jurusita.

2) Aris, SH., 19660422 199402 1 002, Barru/ 22 April 1966, Jurusita.

3) Abdul Rahman, SH., 19691130 199303 1 003 U., Pandang/ 30 Nopember 1969, Jurusita Pengganti.

4) Hj. Nurhayati, S.HI, 19611231 198303 2 016, Polmas/ 13 Februari 1961, Jurusita Pengganti.

5) Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, 19710505 199903 2 010, Sengkang/ 05 Mei 1971, Jurusita Pengganti.

- 6) Umar Boften, 19581229 198802 1 001, Ambon/ 31 Desember 1959, Jurusan Pengganti.
- 7) Muh. Sabir, SH., 19741109 119403 1 002, U. Pandang/ 09 Nopember 1974, Jurusan Pengganti.
- 8) Taufik, 19780220 200604 1 003 U., Pandang/ 20 Februari 1978, Jurusan Pengganti.
- 9) Tri Sutrisno, 19780413 200604 1 010, Jeneponto/ 13 April 1978, Jurusan Pengganti
- 10) Hasnaini, 19641231 200604 2 011, Soppeng/ 31 Desember 1964, Staf.
- 11) Muhammad Ilham Jaya, S.Kom, 19870608 200912 1 005, Palopo/ 08 Juni 1987, Staf.
- 12) Nur Uliya Arif, SH., 19810106 200912 2 002, U. Pandang/ 96 Januari 1981, Staf.

d. Kesekretariatan

- 1) Rahmat Riyadi Jufri, ST, 19751022 200604 1 003, U. Pandang/ 22 Oktober 1975, Kasubbag Umum.
- 2) Irfantahir Arnan., S.Pi, 19811026 200604 1 003, U. Pandang/ 26 Oktober 1981, Kasubbag Kepegawaian.
- 3) Hasanuddin R., ST., 19720705 200604 1 003, U. Pandang/ 05 Juli 1972, Kasubbag Keuangan.
- 4) Muh. Irsal. ST, 19780515 200604 1 005, U. Pandang/ 15 Mei 1978, Staf.

- 5) Rima Arisanty, 19780327 200904 2 005, Makassar/ 27 Maret 1978, Staf.
- 6) Irwan Azis, A.Md, 19801125 200912 1 002,U. Pandang/ 25 Nopember 1980, Staf.
- 7) Haeriah, 19801205 200912 2 002, Mombi/ 05 Desember 1980, Staf.
- 8) Saharuddin, 19861012 200912 1 004, U. Pandang/ 12 Oktober 1986, Staf.
- 9) Helvira, S.Hi, 19800301 201101 2 007, Maros/ 01 Maret 1980, CAKIM

B. Proses Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Mantan Istri Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selain mantan istri berhak mendapatkan sepertiga atas gaji mantan suami nya, dan sepertiga untuk anak nya karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, disamping itu juga mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dari mantan suami nya pasca perceraian, sedangkan hadhanah anak merupakan tanggungjawab bersama meskipun sudah terjadi perceraian.

Bapak Muh Ridwan salah satu hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan dalam prakteknya hak-hak istri pasca perceraian ini sering terabaikan,

sehingga mantan istri tidak mendapatkan apa-apa setelah bercerai dengan suaminya. Padahal setelah bercerai seorang istri masih harus dibayar hak-haknya. Seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya tentu mempunyai proses hukumnya. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat, untuk melindungi dan menjaga hak-hak seorang istri tersebut, di dalam proses beracara perkara cerai talak hakim menggunakan suatu hak nya yang dinamakan dengan *Hak ex offisio*. *Hak ex offisio* yaitu hak yang dimiliki seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.²

Bapak Muh Ridwan menambahkan bahwa hak ini dapat digunakan hakim pada perkara cerai talak, dengan penyebab perceraian bukanlah karena istri *nusyuz* atau membangkang pada perintah suami, dengan catatan perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah islam. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Apabila nafkah-nafkah tersebut tidak disebutkan atau tidak dituntut oleh kedua belah pihak maka hakim dapat langsung memutuskannya tanpa harus disebutkan dalam petitum tuntutan terlebih dahulu.³

Sejauh ini *hak ex offisio* mendapat respon positif dari para hakim. Banyak para hakim Pengadilan Agama Makassar yang memutuskan perkara dengan menggunakan hak tersebut. Hakim merasa kasihan jika melihat seorang istri yang selama perkawinannya masih utuh mengabdikan kepada suaminya, kemudian setelah diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan pesangon (nafkah mut'ah dan

² Muh. Ridwan Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

³ Muh. Ridwan Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

nafkah iddah). Padahal setelah bercerai seorang istri masih harus dibayar hak-haknya.⁴

Hak ex officio tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh hakim untuk melindungi hak – hak yang dimiliki seorang istri setelah diceraikan oleh suaminya. Pada proses beracara dalam perkara cerai talak yang diputuskan hakim dengan menggunakan *hak ex officio* relative sama dengan proses – proses perceraian pada umumnya. Akan tetapi dalam perkara yang akan diputuskan dengan menggunakan *hak ex officio* hakim lebih aktif bertanya, agar hakim dapat mengungkap fakta-fakta yang dapat memudahkan hakim untuk mengambil keputusan.

Dalam prakteknya, hakim bersifat aktif dalam menangani setiap masalah yang ditanganinya. Sifat aktif ini dimaksudkan agar hakim mencari tahu berdasarkan pengetahuannya dan bagaimana hukum dari perkara yang dihadapkan padanya. Mempelajari setiap kasus dengan sungguh-sungguh, karena yang dikeluarkan hakim adalah sebuah hukum yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia tetapi juga di akherat. Di sisi lain juga hakim bersifat pasif, pasif dalam arti tidak mencari-cari masalah kemudian membawanya ke majelis persidangan. Akan tetapi seorang hakim bersifat pasif artinya hakim hanya menunggu perkara yang datang padanya. Hakim tidak dapat memutuskan perkara

⁴Muh. Ridwan Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

yang tidak diajukan Pengadilan. Semua perkara yang ditanganinya harus diajukan secara administrasi ke Pengadilan.⁵

Hak ex officio ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap seorang istri yang diceraikan suaminya. Hak-hak istri setelah diceraikan oleh suaminya biasanya diabaikan dan tidak dibayarkan oleh suaminya. Adapun landasan formil mengenai *hak ex officio* ini bertitik tolak pada undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf C tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan suatu biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri*”. Sesuai dengan wawancara bahwa *hak ex officio* dapat digunakan dalam menyelamatkan hak-hak mantan istri yang diceraikan suaminya.

C. Konsekuensi Hukum Karena Tidak Terpenuhi Hak Istri Pasca Berceraai.

Ketika sebuah perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus. Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat istri. Jika istri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan. Sedangkan jika istri

⁵Muh. Ridwan Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

keberatan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami memenuhi kewajibanya.⁶

Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri kepanitera, maka pihak Pengadilan mengirimkan surat panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan Agama. Dari sini timbullah kekhawatiran akankah suami dengan I'tikad baik membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri. Dengan adanya kekhawatiran semacam itulah maka pihak Pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri pada perkara cerai talak.⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mahmuddin selaku hakim di PA Makassar, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi nafkah tersebut. Mereka hanya memberi informasi kepada pihak istri bahwa, apabila suami tidak melaksanakan isi keputusan secara sukarela, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi

⁶ Bannasari, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

⁷ Bannasari, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

haknya.⁸ Hal ini Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Implementasi Hak Isteri Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara utuh mengenai cara-cara perceraian, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan yakni di sebabkan karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian bagi mereka yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama non islam dilakukan di Pengadilan Negeri, dan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup.⁹ Adapun beban yang di maksud adalah ;

⁸ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

⁹ Bannasari, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

- a) Baik suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak suami, kecuali dalam kenyataannya suami dalam tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa istri dapat memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰

Adapun implementasi hak isteri sebagai berikut:

1. Kewajiban Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah sebagai hak istri setelah bercerai

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.¹¹

¹⁰ Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa idah) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang. Sedangkan mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhi talak. Nafkah mut'ah dapat berupa benda/perhiasan ataupun uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami. Nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Bapak Mahmuddin hakim di Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bawa di dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.¹²

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah

1) Hak Istri pada Masa Iddah

- a) Mendapatkan nafkah selama masa iddah.
- b) Mendapatkan perumahan selama masa iddah.
- c) Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

2) Kewajiban Suami pada Masa Iddah istri

- a) Suami wajib memberikan nafkah pada istri.
- b) Suami wajib memberikan perumahan pada istri.

¹² Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

c) Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak.

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah.¹³ Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi :

*“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri”.*¹⁴

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

*Ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal.*¹⁵

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa, tempat tinggal masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa iddah, atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap nusyuz.

¹³ Bannasari, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

¹⁴ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1981), h. 95

¹⁵ Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993), h. 199

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla audukhul*.
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah satu hakim PA Makassar bapak Mahmuddin. nafkah iddah itu tidak tergantung pada pihak istri itu sendiri. Adapun suami sendiri yang dengan suka rela tanpa dituntut dulu oleh istri di Pengadilan Agama memenuhi kewajiban istri yang pada masa iddah.¹⁷

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

*“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*¹⁸

¹⁶Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

¹⁷ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

¹⁸ ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Bapak Mahmuddin hakim di Pengadilan Agama Makassar menegaskan bahwa nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami untuk melaksanakannya. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁹

2. Hak terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 terdapat

¹⁹ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 diatas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahmuddin. Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak

yang masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin di pelihara ibu atau di pelihara bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih dibawah umum 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak di suruh memillih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya.²⁰

Masalah lain yang berkaitan dengan anak adalah apabila orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini maka orang tua lainnya yang tidak menikah lagi dapat meminta kembali hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan yang memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.²¹

Dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

²⁰ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

²¹ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

- 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 - d. Semua nafkah dan *hadhanah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Namun demikian menurut Bapak Mahmuddin salah satu hakim di PA Makassar apabila perceraian terjadi antar suami isteri yang telah berketurunan,

yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri (ibu anak-anak) dengan syarat isteri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupana anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya. Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam Pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.²²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di Pengadilan Agama Makassar yaitu Bapak Mahmuddin yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa implementasi hak isteri pasca bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Makassar, telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.²³

Di dalam pelaksanaan perceraian, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mampu melaksanakan semua yang tertera pada Peraturan Pemerintah No.

²² Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 28 Juni 2013.

²³ Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 Juli 2013.

45 Tahun 1990 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Salah satunya yaitu implementasi hak isteri pasca bercerai.²⁴

Hal tersebut di atas telah diterapkan dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan nomor perkara 864/Pdt.g/2012/PA Mks. Dimana dalam kasus ini hakim dapat dengan mudah memutus perkara karena penggugat/pemohon mampu memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam penerapannya di Pengadilan Agama Makassar yaitu memberikan hak-hak kepada mantan isteri atau pengimlementasian hak isteri pasca bercerai bagi pegawai negeri sipil dan tidak melanggar Perundang-undangan serta norma-norma yang ada.

²⁴ Muh. Ridwan Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara di Pengadilan Agama Makassar*, 29 juli 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum yang dilakukan oleh seorang isteri untuk mendapatkan hak nafkah dari mantan suaminya pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar ialah hak untuk mendapatkan $\frac{1}{3}$ atas gaji mantan suaminya dan $\frac{1}{3}$ untuk anaknya, untuk melindungi dan menjaga hak-hak tersebut didalam proses beraacara perkara cerai maka hakim menggunakan hak *Hak ex offisio* untuk memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.
2. Konsekuensi hukum karena tidak terpenuhinya hak isteri pasca bercerai di Pengadilan Agama Makassar ialah memberikan informasi kepada pihak isteri bahwa apabila suami tidak melaksanakan isi keputusan secara sukarela, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya sebab majelis hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa permohonan cerai talak tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi nafka tersebut.
3. Implementasi hak isteri tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Makassar ialah pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian diwajibkan menanggung beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Adapun beban tersebut adalah kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, kelangsungan pendidikan anak

menjadi tanggung jawab suami kecuali suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan siapa yang dapat memikul biaya tersebut, dan kewajiban kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atas mantan isterinya.

B. Saran

1. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat putusnya perceraian diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.
2. Hendaknya masalah perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dan juga masalah hak dan kewajiban suami istri setelah terjadi perceraian mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Mengingat PNS merupakan unsur Aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku keseharian.
3. Mengadakan dan Mewujudkan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait tentang Undang-Undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya, sehingga suami dan isteri yang mengajukan gugatan perceraian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sehingga masyarakat memahami akibat dan konsekuensi dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. II, 1995.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XVI, 1980.
- Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1981.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf*
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Djoko Prakoso, *pokok-pokok hukum kepegawaian di Indonesi*, Balai Aksara, Jakarta 1990.
- Kompilasi Hukum Islam
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Marzuki, C, *Metodologi Riset*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press : Yogyakarta, 1993.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil

PDF. *UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*

R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Sumur
Bandung, 1984.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa; Jakarta, 1996.

———, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, rev., cet.4. Jakarta:
Djambatan, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Budi durachman, *kompilasi hukum islam*, bandung:fokus media, 2005.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Herman Senong , lahir di Salo bukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, tanggal 13 September 1989, merupakan anak pertama pasangan dari Ayahanda Tercinta H. Senong dengan Ibunda Tercinta Hj. Hasma. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SDN 4 Tanru Tedong Kabupaten Sidrap pada Tahun 1996/1997 kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS As'adiyah Putera II Pusat Sengkang Kabupaten Wajo pada tahun 2001/2002, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Aliah Putera Macanang Pusat sengkang Kabupaten Wajo tahun 2004/2005, kemudian bekerja di salah satu kelompok tani di sidrap dan kursus bahasa inggris pada tahun 2008, lalu pada tahun 2009 ia melanjutkan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada organisasi intra yakni sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum 2010, dan organisasi ekstra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gabungan Aktifis Lintas Kampus (GALAK) 2011 dan Pemuda Pancasila (PP) 2011.